

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia sudah terbiasa dengan pernyataan bahwa Indonesia adalah negara hukum atau negara berdasarkan hukum. Pernyataan ini memang merujuk pada pernyataan tertulis di dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan: "Indonesia ialah Negara yang berdasar atas hukum (*rechtsaat*) dan Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtstaat*) tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtstaat*)".¹ Bahkan setelah Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ketentuan tersebut dipertegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: "Negara Indonesia adalah Negara hukum". Hal ini menunjukkan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum dan hukum dijadikan sebagai panglima.

Sementara itu, tujuan dari Negara Indonesia adalah apa yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yaitu membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah bangsa Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

¹ Natangsa Surbakti, 2010, *Filsafat Hukum (Perkembangan Pemikiran dan Relevansinya dengan Reformasi Hukum Indonesia)*, Surakarta: Badan penerbit FKIP Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 138.

Negara Indonesia mengenal beberapa hukum, salah satunya adalah hukum pidana. Van Hammel menyatakan hukum pidana merupakan keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya guna menegakkan hukum yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*Unrecht*) dan mengenakan suatu nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut.² Hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum yang maknanya lebih luas daripada pidana, karena mencakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata.³

Dalam bekerjanya hukum pidana, pemberian pidana bukanlah tujuan akhir, karena hanya sebagai sarana belaka untuk mewujudkan sistem pidana itu sendiri. Sementara itu, yang menjadi fungsi khusus hukum pidana adalah melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang hendak merugikannya, dengan sanksi yang berupa pidana, yang sifatnya lebih tajam dibandingkan dengan sanksi yang terdapat dalam bidang hukum lainnya.⁴ Dalam rumusan redaksional yang lain, dikemukakan oleh Muladi bahwa fungsi hukum pidana pada dasarnya adalah melindungi sekaligus menjaga keseimbangan antara kepentingan Negara dan masyarakat, kepentingan si pelaku tindak pidana dan kepentingan si korban.⁵

² Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2005, *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 21.

³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, cetakan ketiga, P.T. Alumni, Bandung, hal. 1.

⁴ Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Semarang: yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hal. 11-12.

⁵ Muladi, 1995, *Kapitan Selekt Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hal. 129.

Indonesia mempunyai sistem hukum yang terorganisir satu sama lain, antara lembaga yang satu dengan yang lain mempunyai hubungan dan saling melengkapi. Lembaga-lembaga tersebut mengurus orang yang sama serta mempunyai tugas dan tanggungjawab masing-masing. Hal ini diciptakan sebagai suatu kontrol antar lembaga. Contoh setelah dilakukan penyidikan oleh kepolisian akan diteruskan oleh kejaksaan untuk melakukan penuntutan kemudian pengadilan mengadili dan memutuskan perkara dan dilanjutkan lembaga pemasyarakatan sebagai pelaksana pemberian hukuman penjara atau kurungan. Semua proses itu saling berkesinambungan, dan keberhasilan dari proses hukum itu akan sangat ditentukan oleh keempat institusi itu. Namun dalam hal tujuan pemidanaan, lembaga pemasyarakatan dianggap sebagai lembaga yang paling bertanggungjawab.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat dimana setiap pembinaan kepada pelaku tindak pidana dilakukan. Masyarakat menganggap bahwa pembinaan di lapas selama ini kurang maksimal, hal ini disebabkan banyaknya pelaku kejahatan keluar masuk menjalani hukuman di Lapas dan kembali melakukan tindak pidana. Apabila kita dalami yang menjadi tujuan dari hukum pidana, menurut S.R Sianturi, pada umumnya adalah melindungi kepentingan orang perorangan (individu) atau hak-hak asasi manusia dan melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat dan negara dengan pertimbangan yang serasi dari perbuatan-perbuatan yang merugikan di satu pihak dan dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang di lain pihak.⁶ Jadi

⁶ S. R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, dalam Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2005 Hukum Pidana , Surakarta: Fakultas Hukum UMS. hal. 319.

dengan kata lain negara berhak menghukum pelaku tindak pidana sesuai kewenangannya. Walaupun demikian, hal itu sangat sulit untuk diwujudkan, banyak sekali orang yang pernah menjalani hukuman dan rehabilitasi di lapas kemudian keluar menggulangi tindak pidana lagi. Sebagaimana contoh kasus, dikutip dari Harian Solopos, pencurian yang dilakukan oleh Suyamto, 56 tahun seorang *residivis* kasus pencurian kembali dibekuk petugas. Dia dibui di Mapolres Klaten, Suyamto melakukan tindak pidana pencurian sepeda angin milik Miyadi, 40 tahun, penduduk talak, Desa Kurung Ceper, Klaten.⁷ Kasus lain di wilayah Sragen dikutip dari Solopos, seorang *residivis* yaitu Suparman 39 tahun babak belur dihajar massa setelah mencoba melakukan pencurian sepeda motor dengan kekerasan di dukuh Tawengan Desa Pilangsari, Kecamatan Ngrompol, Sragen. Sabtu 14 Juli 2012 bapak 3 anak ini mendekam di Mapolres Sragen, pelaku akan dijerat dengan Pasal 365 KUHP dengan ancaman lebih dari 5 tahun.⁸

Berkaitan dengan *residivis*, data yang didapatkan penulis dari hasil penelitian di Lapas Klaten pada April 2013 berjumlah delapan (8) orang, data ini diperoleh dari tahun 2012 sampai bulan April 2013.⁹ Sedangkan di Lapas Sragen pada Juni 2013 terdapat empat (4) *residivis* data ini diperoleh dari tahun 2012 sampai bulan Juni 2013.¹⁰ Dari hasil penelitian di Lapas Klaten

⁷ www.indepnews.com/2013/01/kepergok-curi-sepeda-angin-residivis.html.

⁸ [www.solopos.com/2012/07/16/gagal-berkencan-residivis-babak-belur-dihakimi massa-201915](http://www.solopos.com/2012/07/16/gagal-berkencan-residivis-babak-belur-dihakimi-massa-201915)

⁹ Tri widyatwati, Kasubsi Registrasi dan Bimkemas, Lapas Klaten, *Wawancara Pribadi*, Klaten, Senin, 20 Februari 2013, pukul 12:35 WIB.

¹⁰ Tutut Jemi Setiawan, Kasi. Bimbingan Narapidana dan Anak didik, Lapas Sragen, *Wawancara Pribadi*, Sragen, Rabu, 26 Juni 2013, pukul 10:35 WIB.

diketahui adanya peningkatan 30% kasus yang berkaitan dengan *residivis*.¹¹ Peningkatan kejahatan yang dilakukan para mantan napi di daerah hukum Karesidenan Surakarta dalam hal ini di wilayah hukum Sragen dan Klaten bukan dikarenakan semata-mata lemahnya sistem pembinaan dari Lembaga Pemasyarakatan di wilayah hukum ini, perlu ada kajian yang mendalam lagi tentang stigma negatif ini.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang disebut *Residivis* adalah orang yang pernah dihukum dan yang mengulangi melakukan tindak pidana yang serupa dalam arti pejahat kambuhan.¹² Berkaitan dengan sistem pidana Indonesia yang menganut sistem pemasyarakatan, maka harusnya setiap upaya untuk mencegah terulangnya kembali tindak pidana perlu persiapan yang khusus dan peraturan yang khusus pula untuk mencegah hal tersebut. Dalam PP Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan warga Binaan Pemasyarakatan, yang dimaksud Pembinaan dalam Pasal 1 butir 1 adalah “*kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual jasmani dan rohani Narapidana dan anak didik Pemasyarakatan*”. Sementara itu Arti Pembimbingan terdapat Pada Pasal 1 butir 2 adalah “*pemberian tuntutan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani klien Pemasyarakatan*”. Sementara itu Pasal 1 butir 4 yang dimaksud Pembina Pemasyarakatan adalah “*petugas pemasyarakatan yang*

¹¹ *Ibid.*

¹² <http://www.KamusBahasaIndonesia.org>, diunduh pada hari Minggu 15 September 2013 Pukul 19.36 WIB.

melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan di LAPAS". Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Maka melihat permasalahan tersebut di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul "ANALISIS YURIDIS EMPIRIS PELAKSANAAN PEMBINAAN NAPI *RESIDIVIS* DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (Study Kasus di Lembaga Pemasyarakat Klaten dan Lembaga Pemasyarakatan Sragen).

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Agar penulisan hukum ini tidak mengalami kerancuan serta terfokus pada pokok permasalahan serta pembahasan yang telah ditentukan, maka penulis membatasi permasalahan yang akan diteliti yaitu: Analisis yuridis empiris pelaksanaan pembinaan napi *residivis* di Lembaga Pemasyarakatan, dimana penelitian dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas II B Klaten dan Sragen Kelas II A Sragen.

Sementara itu, berdasarkan latar belakang dan pembatasan yang penulis buat maka penulis menemukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah proses pembinaan narapidana yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sragen?
2. Apakah perbedaan pembinaan antara napi *residivis* dengan napi biasa di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sragen?

3. Apakah kendala-kendala yang dihadapi dalam pembinaan narapidana *residivis* di Lembaga Pemasyarakatan Klaten dan Lembaga Pemasyarakatan Sragen serta upaya apa yang dilakukan untuk menyelesaikanya?

C. Tujuan dan Manfaat

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka peneliti menentukan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui proses pembinaan bagi narapidana yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sragen yang dilakukan oleh para Sipir.
2. Untuk mengetahui perbedaan pembinaan antara napi *residivis* dengan napi biasa yang dilakukan oleh para Sipir Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sragen.
3. Untuk mengetahui kendala pelaksanaan pembinaan terhadap para Narapidana *Residivis* tersebut.

Penelitian ini diharapkan juga memberikan manfaat yaitu :

1. Manfaat teoritis

Penulis dalam melakukan penelitian diharapkan memberikan kontribusi atau sumbangsih pemikiran bagi kemajuan ilmu hukum di Indonesia khususnya hukum pidana.

2. Manfaat praktis

Dapat memberikan solusi atau memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti, dan mampu menerapkan ilmu hukum yang penulis sudah peroleh.

D. Kerangka Pemikiran

Tindak pidana yang dilakukan oleh *residivis* merupakan suatu fenomena kejahatan yang sangat menarik untuk dikaji secara mendalam, dikarenakan kita dapat mengetahui sebab dari para pelaku kejahatan tersebut melakukan kejahatannya kembali. Perlunya upaya yang ekstra dari semua institusi hukum dalam pencegahan hal itu, peran serta masyarakat dan Lapas sangat dibutuhkan dalam melakukan upaya tersebut. Dengan mendorong semua Lapas di Indonesia melakukan pembinaan bukan dalam konteks yang terdapat dalam undang-undang saja, akan tetapi perlu adanya terobosan yang bisa mengubah perilaku *residivis* dengan menyalurkan ataupun memberikan pekerjaan kepada para *residivis* ini. Menurut Sudarto, fungsi hukum pidana dibedakan menjadi (2) dua yakni: Fungsi umum hukum pidana yaitu mengatur hidup masyarakat atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Sementara itu, fungsi khusus bagi hukum pidana yaitu melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang hendak merugikannya dengan menggunakan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada hukum lainnya.¹³ Sehingga

¹³ Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat (Kajian terhadap pembaruan hukum pidana)*, Sinar Baru, Bandung, hal. 62.

dalam hal ini fungsi dari hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan korbannya dan mengatur masyarakat agar tertib.

Pengertian pidana sebagai sanksi berupa penderitaan yang sengaja dikenakan negara kepada seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana dan mempunyai kesalahan, berkaitan dengan asas legalitas yang terkandung di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP (Pasal 1 ayat (1) RUU KUHP). Asas legalitas ini sering disebut sebagai *asas nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenale*. Asas ini pada mulanya diperkenalkan oleh Anselm von Fuerbach. Menurut asas legalitas ini tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya.¹⁴

Penderitaan yang sengaja dikenakan oleh negara yaitu dengan negara memberikan hukuman diantara berupa penjara atau kurungan yang diserahkan kepada lembaga pemasyarakatan sebagai lembaga pelaksana hukuman penjara atau kurungan. Lembaga Pemasyarakatan sehubungan dengan pengenaan penderitaan terhadap para pelaku tindak pidana yaitu dengan diisolasi para pelaku tindak pidana kejahatan untuk berhubungan dengan masyarakat dan keluarganya. Pembatasan dari ruang gerak dan waktu pelaku tindak pidana adalah agar para pelaku tindak pidana merenungi kesalahannya.

Masyarakat seringkali mendengar bahwa dalam kasus-kasus kejahatan seperti pencurian, penipuan terulang kembali, dengan pelaku yang sama. Karena suatu hal tertentu setelah menjalani hukuman di lapas dan keluar mereka melakukan kejahatan serupa kembali. Hal ini sebetulnya sangat

¹⁴ Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, hal. 2.

menyedihkan dan cenderung mencoreng sistem pemidanaan Indonesia. Sistem pidana Indonesia yang diciptakan untuk penjeraan terhadap setiap pelaku tindak pidana karena adanya pengulangan kembali tindak pidana oleh para napi maka ada stigma buruk terhadap sistem pidana Indonesia. Stigma itu didasarkan dengan banyaknya kasus pengulangan tindak pidana maka anggapan bahwa tujuan sistem pidana Indonesia untuk penjeraan pelaku tindak pidana telah pupus.

Kita bisa melihat dalam realita kehidupan bermasyarakat, penerapan hukuman cenderung tidak efektif ada banyak sebab yaitu hukumnya itu sendiri, penegak hukum, sarana dan fasilitas, serta kebudayaan masyarakat itu sendiri. Faktor-faktor tersebut yang menyebabkan efektifitas hukuman dirasa tidak optimal. Proses penegakan hukum, dalam pandangan Soerjono Soekanto, dipengaruhi lima faktor:¹⁵ *Pertama*, faktor hukum atau peraturan perundang-undangan. *Kedua*, aparat penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatan dan penerapan hukumnya, yang berkaitan dengan masalah mentalitas. *Ketiga*, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum. *Keempat*, faktor masyarakat, yakni lingkungan sosial dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan; berhubungan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum yang merefleksi dalam perilaku masyarakat. *Kelima*, faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kita bisa melihat dari kacamata lembaga pemasyarakatan akan kita temukan suatu perkara yang bisa mengungkap faktor tersebut berperan atau

¹⁵ Soerjono Soekanto, 1983, *Penegakan Hukum*, Jakarta: BPHN dan Binacipta, hal. 15.

tidak. Akhir-akhir ini Lapas di daerah banyak menjadi sorotan masyarakat dikarenakan adanya kerusuhan-kerusuhan yang terjadi disebabkan oleh para narapidana yang mempunyai berbagai alasan dan permasalahan yang menyebabkan pembakaran serta kerusuhan antar penghuni. contoh Lapas Kerobokan Denpasar dan Lapas Tanjung Gusta Medan berulah.

Seperti dikutip dari harian Kompas, Pasca rusuh Lapas Tanjung Gusta Medan, polisi dibantu TNI bersiaga untuk mengejar dan menjaga agar kerusuhan tidak terulang kembali.¹⁶ Kalau kita bisa memandang lurus akan kita temukan hal yang menarik yaitu sebab-sebab dari semua itu dan ada apa dengan hal itu dihubungkan dengan efektifitas hukuman dari sistem pemasyarakatan. Akhir-akhir ini banyak diketahui oleh publik dari pemberitaan media cetak ataupun media elektronik bahwa Kementerian Hukum dan Ham (KEMENKUMHAM) telah menambah anggaran 1,6 trilyun untuk membangun lembaga pemasyarakatan baru.¹⁷ Hal dikarenakan penjara-penjara yang ada di Indonesia sudah melebihi kapasitas. Dari hal itu akan kita temukan jawaban dari penambahan anggaran tersebut, bahwa yang terjadi dalam sistem pemidanaan kita kurang efektif dalam mengurangi tingkat kejahatan, dengan penuhnya lapas-lapas di Indonesia dan cenderung melebihi kapasitas yang menyebabkan banyak terjadi kerusuhan-kerusuhan di Lapas.

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) menurut Undang-Undang No.12 Tahun 1995 Pasal 1 butir 3 adalah : *"tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan"*. Jadi peran Lapas sangatlah

¹⁶ Kompas. "Kerusuhan Lapas", Edisi Jumat , 26 Juli 2013.

¹⁷<http://www.rmol.co/read/2011/06/30684/Kemenkumham-Minta-tambahan-1,6Triliun->, diunduh pada hari Selasa 3 September 2013 Pukul 12.56 WIB.

penting dan cenderung sebagai lembaga yang selalu disorot masyarakat tiap kali kejahatan terulang kembali oleh pelaku yang sama. Dalam PP Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan warga Binaan Pemasyarakatan. Pasal 1 butir 1 yang dimaksud Pembinaan adalah *“kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual jasmani dan rohani Narapidana dan anak didik Pemasyarakatan”*. Sedangkan Pasal 1 butir 2 yang dimaksud dengan Pembimbingan adalah *“pemberian tuntutan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani klien Pemasyarakatan”*. Sedangkan Pasal 1 butir 4 yang dimaksud Pembina Pemasyarakatan adalah *“petugas pemasyarakatan yang melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan di LAPAS”*.

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Lembaga pemasyarakatan sebagai unit pelaksana teknis di dalam melaksanakan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan, walaupun institusi kepolisian berhasil menangkap pelaku kejahatan dan mengungkapkan kasus kejahatan tersebut, intitusi kejaksaan berhasil membuktikan dakwaannya dan insitusi pengadilan berhasil memutus perkara tersebut dengan seadil-adilnya. Namun apabila setelah menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan dan kemudian bebas dan berbaur dalam masyarakat dan kemudian melakukan tindak pidana yang sama, maka dalam hal ini institusi atau lembaga yang paling bertanggungjawab adalah Lembaga Pemasyarakatan. Walaupun dalam tata peradilan pidana melalui tahapan-

tahapan dari institusi satu ke institusi yang lain, tapi yang menjadi sorotan masyarakat adalah tetap pada LAPAS karena lapaslah yang berperan dalam melakukan pembinaan dan pembimbingan terhadap semua narapidana.

E. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah metode yang digunakan dalam sebuah penelitian atau digunakan dalam aktifitas penelitian.¹⁸ Untuk memperoleh hasil penelitian yang maksimal sesuai dengan penulis harapkan, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang diterapkan penulis adalah pendekatan yuridis empiris yaitu suatu usaha yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan hidup dalam masyarakat.¹⁹ Dalam hal ini penulis akan mengkaji pelaksanaan pembinaan napi *residivis* di lembaga pemasyarakatan dan kesenjangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif,²⁰ dimana penulis berusaha memberikan gambaran tepat mengenai Pelaksanaan Pembinaan Napi *Residivis* di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II B Klaten dan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II A Sragen.

¹⁸ Beni Ahmad Saebani, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV Pustaka Setia, hal. 16.

¹⁹ Hilman hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar maju, hal. 61.

²⁰ Amirudin, zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 25.

3. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sragen Jawa tengah.

4. Metode Analisis data

Analisis data adalah suatu proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.²¹

Penulis menggunakan metode analisis kualitatif, teknik analisis kualitatif pada dasarnya mempergunakan pemikiran logis, analisis, dengan logika, dengan induksi, dengan deduksi, analogi, komparasi dan sejenis dengan itu.²² Sehubungan dengan hal tersebut penulis akan memaparkan apakah pelaksanaan pembinaan napi *residivis* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sragen dapat memberikan pembinaan terhadap napi *residivis* agar tidak melakukan pengulangan tindak pidana yang dilakukan dahulu.

5. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Penulis mendapatkan data primer dari pejabat LAPAS kelas II B Klaten dan LAPAS kelas II A Sragen

b. Data Sekunder

Data sekunder berupa bahan yang meliputi bahan pustaka:

²¹ Lexy J. Moleong, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, hal. 183

²² Tatang. M. Amirin, 1986, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: rajawali, hal. 95.

- 1) Bahan hukum primer yang meliputi:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - c) Rancangan Undang-Undang KUHP
 - d) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 - e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
 - f) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

2) Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi literatur-literatur, artikel-artikel tentang *residivis*, serta hasil penelitian yang berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan napi *residivis* di Lembaga Pemasyarakatan.

3) Bahan Hukum tersier

Bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu kamus.

6. Metode Pengumpulan

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan:

a. Studi Kepustakaan

Dilakukan dengan mencari, mencatat, menginventarisasi, menganalisis, data yang berupa bahan-bahan pustaka.

b. Penelitian Lapangan

Pengumpulan data dari pihak terkait dalam objek penelitian dengan cara:

- 1) Wawancara, yaitu cara untuk memperoleh informasi atau data dengan cara melakukan interaksi tanya jawab secara langsung kepada pejabat LAPAS Kelas II B Klaten dan LAPAS Kelas II A Sragen.
- 2) Observasi, dimana selain melakukan wawancara penulis juga melakukan pengamatan langsung terhadap narapidana *residivis* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten dan Lembaga Pemasyarakatan II A Sragen.

F. Sistematika Skripsi

Bab I adalah pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang masalah, tujuan dan manfaat, pembatasan dan perumusan masalah, kerangka pemikiran, metode penelitian.

Bab II adalah tinjauan pustaka, dimana dalam penulisan hukum ini akan memberikan kajian-kajian teoritis mengenai tinjauan umum mengenai Pemasyarakatan, tinjauan umum mengenai *residivis*, serta tinjauan umum mengenai tujuan Pemidanaan.

Bab III menjabarkan hasil penelitian, dimana dalam bab ini menjelaskan tentang proses pembinaan narapidana di Lapas Sragen dan Klaten, perbedaan pembinaan residivis dengan napi biasa di Lapas Sragen dan Klaten, dan kendala serta upaya yang ditempuh dalam pembinaan napi *residivis*.

Bab IV Penutup berisi kesimpulan dan saran.